

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

A. Arah Kebijakan Umum

Kebijakan umum pembangunan Provinsi Kalimantan Timur periode tahun 2009-2013 dijadikan dasar untuk mengarahkan dan memperkuat visi dan misi pembangunan yang dijabarkan dalam RKPD setiap tahun sebagai berikut.

a. Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan

1. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik melalui pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan serta upaya penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang mendukung.
2. Meningkatkan implementasi prinsip Good Governance dalam pemerintahan daerah serta upaya pencegahan, percepatan pemberantasan dan penindakan kasus korupsi.
3. Penegakkan hukum dan transparansi serta penyempurnaan pelayanan publik.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba.
5. Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum untuk kelancaran pemilu dan kegiatan di daerah melalui partisipasi masyarakat dalam fungsi Polmas yang dibuat berjenjang searah dari tingkat desa sampai tingkat provinsi, juga partisipasi Polda, TNI, KODAM, Anggota Linmas dan Ormas Kepemudaan.
6. Meningkatkan pemantapan, pemahaman wawasan kebangsaan dalam wilayah NKRI serta sukapilaku masyarakat yang berdasarkan ideology Pancasila dan UUD 1945.
7. Meningkatkan pendidikan politik kepada masyarakat dan pengembangan sistem metode dan materi dalam rangka peningkatan kewaspadaan.
8. Meningkatkan pembangunan wilayah perbatasan dalam rangka percepatan pembangunan untuk meningkatkan aksesibilitas, perekonomian, pertumbuhan simpul ekonomi sehingga menjadi serambi terdepan terhadap Negara tetangga.
9. Meningkatkan kinerja dan koordinasi pemerintahan serta pengembangan pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pengembangan kapasitas dan koordinasi.
10. Meningkatkan kerjasama dalam dan luar negeri serta antara pemerintah dan lembaga.

11. Mengembangkan dan meningkatkan penataan wilayah administrasi pemerintah melalui upaya penyelesaian pengketaan tata batas wilayah administrasi antar daerah Kabupaten/Kota, antar Provinsi dan antar Negara di Kaltim serta optimalisasi penyelenggaraan batas wilayah.
12. Meningkatkan pengembangan aparatur daerah dan efisiensi organisasi daerah susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis melalui upaya penyempurnaan SDM, pembinaan serta pengembangan aparatur dan pendidikan kedisiplinan, reformasi birokrasi dan pemerataan distribusi pegawai sampai ke daerah terdepan dan pedalaman.
13. Meningkatkan sarana dan prasarana serta pelayanan kearsipan melalui penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah serta peningkatan kualitas pelayanan informasi kearsipan.
14. Meningkatkan penelitian dan pengembangan IPTEK serta pemanfaatan penggunaan hasil penelitian sebagai dasar perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
15. Meningkatkan kualitas penanganan dan penanggulangan bencana melalui pencegahan dini, pengurangan resiko bencana termasuk kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
16. Meningkatkan kualitas dan kualitas informasi serta sarana dan prasarana disegala wilayah melalui pembangunan jaringan teknologi komunikasi dan informasi dilingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten serta penyebarluasan dan jangkauan informasi ke segenap wilayah di Kaltim.
17. Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan dan menerapkan tata pemerintahan yang baik.

b. Bidang Ekonomi

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan struktur ekonomi secara seimbang antara sektor ekonomi yang padat modal (*capital intensif*) dan sektor ekonomi yang padat tenaga kerja (*labor intensif*) dengan memacu sektor-sektor ekonomi yang potensial dan padat tenaga kerja seperti sektor pertanian, sehingga kesenjangan dalam struktur ekonomi semakin kecil.
2. Mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang disesuaikan dengan keunggulan komparatif masing-masing daerah.
3. Membangun sektor pertanian yang tangguh yang meliputi: pangan, perkebunan, perikanan dan peternakan dengan mengembangkan keunggulan komparatif (*comparative advantages*) dan keunggulan kompetitif (*competitive advantages*) yang berbasis agroindustri.

4. Mengembangkan sektor industri dan menengah yang dapat menghasilkan barang setengah jadi sebagai upaya untuk mendorong berkembangnya industri hulu.

c. Bidang Infrastruktur

1. Meningkatkan percepatan pembangunan infrastruktur dasar wilayah yang mencakup transportasi dan komunikasi, kelistrikan serta air bersih yang menghimpun hajat hidup orang banyak dan sebagai prasyarat masuknya investasi (*investment*) baik investasi asing maupun dalam negeri.
2. Mengembangkan wilayah perbatasan sebagai halaman depan Negara RI, wilayah pedalaman dan daerah tertinggal dengan menata dan menggali berbagai potensi ekonomi dan pembangunan infrastruktur di perbatasan.
3. Pembangunan jalan bebas hambatan.
4. Pembangunan dan perbaikan jalan untuk menggerakkan ekonomi rakyat.
5. Pembangunan dan pengembangan bandara dan pelabuhan sesuai dengan hirarki beberapa kab/kota.
6. Membangun dan mengembangkan sumber energi pembangkit listrik alternatif yang potensial, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap, Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara
7. Pengadaan genset di desa
8. Pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air dalam rangka untuk mendukung swasembada pangan.
9. Pembangunan prasarana pengendalian banjir di beberapa kabupaten/kota

d. Bidang Sosial

1. Meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan pembangunan fasilitas pendidikan dasar dan menengah yang mengarah kepada Standar Nasional Pendidikan.
2. Mengembangkan sekolah unggulan di setiap Kabupaten/Kota dalam rangka menjangkau siswa yang berprestasi di setiap daerah sebagai bentuk apresiasi dalam bidang pendidikan.
3. Meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah di wilayah pedalaman, perbatasan, dan tertinggal dan daerah terpencil.
4. Pelayanan kesehatan gratis, puskesmas 24 jam dengan 1 Puskesmas 2 Dokter.
5. Meningkatkan peran serta kemampuan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan desa.
6. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan memperluas percepatan lapangan kerja.

7. Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan dan peningkatan prestasi olahraga.
8. Meningkatkan manajemen kesehatan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk.
9. Meningkatkan jaminan dan perlindungan sosial serta pemenuhan hak masyarakat miskin.

e. Bidang Lingkungan

1. Menjaga dan memelihara kawasan lindung, taman nasional, daerah resapan air, melakukan penghijauan pada lahan kritis dan marginal dalam rangka mengurangi terjadinya bencana alam khususnya banjir dan tanah longsor.

B. Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan adalah program strategis yang diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur selama 5 tahun ke depan yang disesuaikan dengan urusan wajib sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Agenda : Menciptakan Kaltim yang Aman, Demokratis Damai Didukung Pemerintah Yang Bersila dan Berwibawa.

Urusan Wajib

a. Perencanaan Pembangunan

1. Pengembangan data informasi
2. Kerjasama pembangunan
3. Perencanaan pembangunan wilayah strategis dan pertumbuhan
4. Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
5. Perencanaan pembangunan daerah
6. Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah.
7. Perencanaan pembangunan ekonomi
8. Perencanaan sosial dan budaya
9. Pengembangan wilayah perbatasan.
10. Perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

b. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1. Peningkatan dan kenyamanan lingkungan
2. Pemeliharaan ketertiban dan pencegahan kriminal
3. Pengembangan wawasan kebangsaan
4. Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

5. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.
6. Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat
7. Pendidikan politik masyarakat
8. Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

c. Pemerintahan Umum

1. Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan daerah
2. Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
3. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan
4. Pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan kabupaten/kota.
5. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
6. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah.
7. Pelatihan peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan
8. Penataan dan penyempurnaan kebijakan, sistem, struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan
9. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
10. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
11. Peningkatan kerja sama antar pemerintah daerah
12. Penataan peraturan perundang-undangan
13. Penataan daerah otonomi baru
14. Pengembangan wilayah perbatasan.
15. Penelitian dan pengembangan IPTEK.
16. Peningkatan kapasitas pamong praja.

d. Kepegawaian

1. Pendidikan Kedinasan
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Aparatur
3. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

e. Statistik

1. Pengembangan data/informasi/statistik daerah

f. Kearsipan

1. Perbaikan sistem informasi kearsipan
2. Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
3. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
4. Peningkatan kualitas pelayanan informasi

g. Komunikasi dan Informatika

1. Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
2. Pengkajian dan penelitian bidang informasi

3. Fasilitas peningkatan sdm bidang komunikasi dan informasi
4. Kerjasama informasi dengan media

h. Penelitian dan Pengembangan

1. Penelitian
2. Pengembangan

Agenda : Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Daya Saing dan Pro Rakyat.

Urusan Wajib

a. Pekerjaan Umum

1. Pembangunan jalan/jembatan
2. Pembangunan saluran drainase/bronjong
3. Pembangunan talud/bronjong
4. Rehabilitasi/pemeliharaan dan talud/bronjong.
5. Inspeksi kondisi jalan dan jembatan.
6. Tanggap darurat jalan dan jembatan
7. Pembangunan sistem informasi/data jalan dan jembatan.
8. Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
9. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan lainnya
10. Penyediaan dan pengelolaan air baku
11. Pengembangan, pengelolaan, konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
12. Pengembangan dan pengelolaan air minum dan air limbah
13. Pengendalian banjir
14. Pengembangan wilayah strategis dan pertumbuhan
15. Pembangunan infrastruktur pedesaan
16. Monitoring dan evaluasi.

b. Penataan Ruang

1. Perencanaan tata ruang.
2. Pemanfaatan ruang.
3. Pengendalian pemanfaatan ruang.

c. Perumahan

1. Pengembangan perumahan
2. Lingkungan sehat perumahan
3. Pemberdayaan komunitas perumahan
4. Perbaikan perumahan akibat bencana sosial.
5. Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.
6. Pengelolaan areal pemakaman

7. Perencanaan tata ruang
8. Pengendalian pemanfaatan ruang

d. Perhubungan

1. Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
2. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ.
3. Peningkatan pelayanan angkutan
4. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
5. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas

e. Lingkungan Hidup

1. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur.
2. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
3. Perlindungan dan konservasi sumberdaya alam.
4. Peningkatan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

f. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1. Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif
2. Pengembangan kewirausahaan dan regulasi kompetitif usaha kecil menengah
3. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah
4. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

g. Penanaman Modal

1. Pelayanan administrasi perkantoran
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Peningkatan disiplin aparatur
4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
5. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja.
6. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi
7. Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
8. Penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah

h. Kebudayaan

1. Pengembangan jalinan dan nilai budaya
2. Pengelolaan kekayaan budaya
3. Pengelolaan keragaman budaya
4. Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya.

Urusan Pilihan

a. Pertanian

1. Peningkatan kesejahteraan petani
2. Peningkatan ketahanan pangan (tanaman pangan/perkebunan)
3. Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

4. Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
5. Peningkatan produksi pertanian/perkebunan
6. Pemberdayaan penyuluh pertanian/perikanan
7. Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
8. Peningkatan produksi hasil peternakan
9. Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
10. Peningkatan penerapan teknologi peternakan
11. Pengembangan industri pangan berbasis padi.

b. Ketahanan Pangan

1. Penanganan daerah rawan pangan.
2. Laporan daerah berkala kondisi ketahanan pangan.
3. Pengembangan diversifikasi tanaman.
4. Pengembangan lumbung pangan desa.
5. Peningkatan mutu dan keamanan pangan.

c. Kehutanan

1. Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan
2. Rehabilitasi hutan dan lahan
3. Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan
4. Pemanfaatan kawasan hutan industri
5. Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan.
6. Perencanaan dan pengembangan hutan.

d. Pariwisata

1. Pengembangan promosi dan pemasaran pariwisata.
2. Pengembangan tujuan pariwisata.
3. Pengembangan kemitraan.

e. Kelautan dan Perikanan

1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.
2. Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan.
3. Peningkatan kesadaran dan penegakkan hukum pengelolaan sumberdaya laut.
4. Peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut.
5. Peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat.
6. Pengembangan budidaya perikanan.
7. Pengembangan perikanan tangkap.
8. Pengembangan sistem penyuhan perikanan.
9. optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan.
10. Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar.

f. Perdagangan

1. Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
2. Peningkatan kerjasama perdagangan internasional
3. Peningkatan ekspor dan pengembangan eksp
4. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
5. Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.

g. Perindustrian

1. Peningkatan kapasitas iptek sistem produksi
2. Pengembangan industri kecil dan menengah.
3. Peningkatan kemampuan teknologi industri.
4. Penataan struktur industri.
5. Pengembangan sektor industri potensial

h. Energi dan Sumberdaya Mineral

1. Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
2. Pengawasan dan penertiban kegiatan tambang rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
3. Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

Agenda II : Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat.**Urusan Wajib****a. Pendidikan**

1. Pendidikan anak usia dini
2. Wajib belajar pendidikan dasar dua belas tahun
3. Pendidikan menengah
4. Pendidikan nonformal
5. Pendidikan informal
6. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
7. Pengembangan budaya baca dan pembelajaran
8. Manajemen pelayanan pendidikan
9. Pembinaan dan pengembangan perguruan tinggi

b. Agama

1. Pendidikan nonformal
2. Peningkatan Pemerataan Pendidikan.
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia.
4. Peningkatan Mutu Pendidikan.

c. Perpustakaan

1. Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

d. Kesehatan

1. Obat dan perbekalan kesehatan
2. Upaya kesehatan masyarakat
3. Pengawasan obat dan makanan
4. Pengembangan obat Indonesia
5. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
6. Perbaikan gizi masyarakat
7. Pengembangan lingkungan
8. Pencegahan dan penanggulangan penyakit
9. Standarisasi pelayanan kesehatan
10. Pelayanan kesehatan penduduk
11. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
12. Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit jiwa/rumah sakit paru/rumah sakit mata
13. Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit jiwa/rumah sakit paru/rumah sakit mata
14. Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
15. Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
16. Peningkatan pelayanan kesehatan lansia
17. Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan.
18. Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

e. Kependudukan dan Tata Sipil

1. Penataan administrasi kependudukan

f. Pemberdayaan Perempuan

1. Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan.
2. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
3. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.
4. Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.
5. Penguatan kelembagaan pengarusut gender dan anak

g. Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera

1. Keluarga berencana
2. Kesehatan reproduksi remaja
3. Pelayanan kontrasepsi.
4. Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan kb/kr yang mandiri

5. Promosi kesehatan ibu, bayi, dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat
6. Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling krr.
7. Peningkatan penanggulangan narkoba, pms termasuk hiv/aids.
8. Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.
9. Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga.
10. Pengembangan model rasionalisasi penyandang PADU.

h. Sosial

1. Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya.
2. Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.
3. Pembinaan anak terlantar.
4. Pembinaan para penyandang cacat dan trauma.
5. Pembinaan panti asuhan/panti jompo.
6. Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana PSK, narkoba penyakit sosial lainnya).
7. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.

i. Ketenagakerjaan

1. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
2. Peningkatan kesempatan kerja
3. Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

j. Pemuda dan Olahraga

1. Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda.
2. Peningkatan peran serta kepemudaan
3. Peningkatan upaya penumbuhan usaha dan kecakapan hidup pemuda.
4. Pencegahan penyalahgunaan narkoba.
5. Pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga
6. Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga.
7. Peningkatan sarana dan prasarana olah raga

k. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Peningkatan pemberdayaan masyarakat pedesaan
2. Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan.
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.
4. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa.
5. Peningkatan peran perempuan di perdesaan.

Urusan Pilihan

a. *Transmigrasi*

1. Pengembangan wilayah transmigrasi
2. Transmigrasi lokal
3. Transmigrasi regional